

JURNAL
PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN
2010 TENTANG PEMBATASAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA
YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

EVA MARTA CLAUDIA

NPM : 110510547

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN
2010 TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA
YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

EVA MARTA CLAUDIA

NPM : 110510547

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 25 Januari 2016

N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum

Tanda tangan :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,L.LM.

PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 79 TAHUN 2010 TENTANG PEMBATAAN USAHA WARALABA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA

Eva Marta Claudia

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

evamartaclaudia@yahoo.co.id

ABSTRACT

Nowadays, there are many minimarket franchise in Yogyakarta. Many of these minimarket franchise do not comply with Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 2010 regarding the limitation of minimarket franchise in Yogyakarta. The purpose of this research is to know whether the existing minimarket franchises are already in comply with the Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 2010. This research is an empirical law research with qualitative approach. The data in this paper is gathered using primary data and secondary data. Furthermore, the collection data used interview. The analysis data used inductive analysis. The result showed that the implementation of the Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 2010 has not been enforce as it should be. Even though the majority of these minimarket franchises already comply with the nregulation, one can still find some minimarket franchises who do not comply with the Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010.

Keywords : *minimarket franchise, Yogyakarta Mayor Regulation Number 79 Year 2010, traditional market.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dan perdagangan bebas yang penuh persaingan sekarang ini, sistem usaha waralaba muncul sebagai salah satu komoditi usaha yang sangat menjanjikan. Perkembangannya yang pesat mengindikasikan sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik, sekaligus membantu pelaku usaha dalam memulai suatu usaha sendiri dengan tingkat kegagalan yang rendah. Bisnis waralaba memiliki beberapa keunggulan, yaitu dapat memperluas jaringan usaha dengan cepat, menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan, meningkatkan lapangan

kerja baru, mampu mempercepat alih teknologi dan meningkatkan peluang berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta merupakan pilihan berwiraswasta dengan resiko yang kecil.¹

Salah satu usaha waralaba yang perkembangannya sangat pesat yaitu waralaba minimarket. Minimarket memiliki gerai yang lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan kelompok ritel lainnya seperti hypermarket dan supermarket.² Pertumbuhan ekonomi

¹ Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 127.

² Bob Foster, 2008, *Manajemen Ritel*, Alfabeta, Jakarta, hlm. 22.

memang semakin maju dengan tumbuhnya toko modern ini, namun pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional. Tetapi kecenderungan bisnis sekarang semakin tidak memperhatikan masalah etika, sehingga kepentingan pasar dan jenis usaha ini akan saling bertabrakan sehingga dapat menciptakan persaingan atau iklim perdagangan yang tidak sehat.

Di Kota Yogyakarta sendiri keberadaan waralaba minimarket sudah tersebar diberbagai wilayah, tidak hanya ditepi jalan besar saja, tetapi juga berada diwilayah pemukiman padat penduduk. Keberadaan minimarket tersebut akan membawa dampak negatif terhadap warung atau pasar tradisional. Minimarket lebih dipilih masyarakat karena lebih memiliki daya tarik di banding warung atau pasar tradisional.

Permasalahan yang muncul adalah banyaknya minimarket yang berdiri di Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Dikota Yogyakarta. Diantaranya mengenai jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut. Padahal dalam pasal 6 ayat (1) di jelaskan mengenai jarak minimal pendirian usaha waralaba minimarket, yaitu berjarak paling dekat 400 meter dari pasar tradisional. Didalam peraturan ini juga terdapat aturan mengenai jalan-jalan yang diperbolehkan untuk usaha waralaba minimarket dan mengenai jumlah maksimal usaha waralaba minimarket yang di perbolehkan yaitu 52 gerai. Sedangkan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2009 lalu untuk jumlah pendirian minimarket sudah

terpenuhi, sehingga tidak di mungkinkan ada penambahan waralaba minimarket baru.³

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian hukum ini merupakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁵
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam

³<http://jogja.antaranews.com/m/berita/333808/yogyakarta-menerbitkan-tiga-surat-peringatan-minimarket-waralaba> diakses pada tanggal 8 Oktober 2015

⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁵ *Ibid*, hlm. 106.

bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁶

1) Bahan Hukum Primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian,⁷ meliputi :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- b) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern
- c) Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.⁸ Meliputi : buku-buku tentang hukum waralaba (franchise), buku-buku tentang minimarket bersistem waralaba (franchise), asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literature, tinjauan pustaka, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan wawancara yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu:

a. Studi kepustakaan, adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁹

b. Studi lapangan, adalah data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.¹⁰

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara berfokus, yaitu wawancara yang dilakukan biasanya terdiri dari pertanyaan yang tidak mempunyai struktur tertentu, tetapi selalu terpusat pada satu pokok permasalahan tertentu.¹¹

Wawancara akan dilakukan kepada pihak Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Yogyakarta, dan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

4. Metode Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang di peroleh selama penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan dengan sistematis, sehingga didapat suatu gambaran tentang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 107.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

apa yang di teliti. Sedangkan metode berpikir yang digunakan dalam mengambil kesimpulan ialah metode induktif, yaitu penyimpulan dari pengetahuan yang bersifat khusus, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat umum. Metode induktif merupakan analisis data dari hasil wawancara dengan para informan terhadap Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta untuk menentukan kesimpulan umum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Waralaba (*Franchise*)

1. Pengertian Waralaba

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba : “Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap system bisnis dengan cirri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan / atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan / atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.

2. Waralaba Di Indonesia

Di Indonesia, sistem waralaba mulai dikenal pada tahun 1950-an, yaitu dengan munculnya *dealer* kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Perkembangan kedua dimulai pada tahun 1970-an, yaitu dengan dimulainya sistem pembelian lisensi

plus, yaitu pewaralaba tidak sekedar menjadi penyalur, namun juga memiliki hak untuk memproduksi produknya. Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi pengwaralaba maupun pewaralaba. Karenanya, kita dapat melihat bahwa di negara yang memiliki kepastian hukum yang jelas, waralaba berkembang pesat, misalnya di AS dan Jepang.

3. Dasar Hukum Waralaba

Sebagai suatu perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, secara khusus pengaturan mengenai waralaba di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba, Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, serta Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 68/M-DAG/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern.

4. Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba sama seperti perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal

1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal

Perjanjian Waralaba menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang waralaba :

“Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa asing dan perjanjian tersebut harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia”.

5. Jenis-jenis waralaba :

Ada dua jenis waralaba yang sudah biasa dijalankan oleh pelaku usaha di Indonesia sebagai berikut¹²:

- a. Waralaba format bisnis (*Business format franchise*)
Adalah suatu waralaba dengan ketentuan pemberi waralaba memberi penerima waralaba rencana yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengoperasikan suatu usaha.
- b. Waralaba Produk dan Merek Dagang (*Product of trade name franchise*)
Adalah suatu waralaba dengan ketentuan pemberi waralaba mengizinkan penerima waralaba untuk menjual produk dengan

menggunakan merk dagang dan logo pemberi waralaba.

B. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta

1. Kondisi Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Jumlah toko modern di Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Beberapa *brand* waralaba minimarket yang peneliti temukan dalam penelitian ini didominasi oleh Indomaret milik PT.Indomarco Prismatama, Alfamart milik PT.Sumber Alfaria Jaya dan Circle K milik PT.Circle K Indonesia Utama. Dari pengamatan yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa waralaba minimarket yang menyalahi Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket, seperti waralaba minimarket yang jaraknya kurang dari 400 meter dari pasar tradisional, salah satunya Indomaret yang terletak di Jalan Bhayangkara dekat dengan Pasar Pathuk dan Alfamart yang terletak di Jalan Imogiri Timur dekat dengan Pasar Giwangan.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Perizinan bahwa jumlah kuota waralaba minimarket di Kota Yogyakarta yaitu 52 minimarket dan kuota tersebut sudah terpenuhi. Tetapi setelah peneliti melakukan pengamatan ternyata jumlah waralaba minimarket di Kota Yogyakarta melebihi jumlah kuota tersebut.

2. Kebijakan Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

¹² Harsono, 2006, *Bisnis Pengantar*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, hlm. 58.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta yang merupakan salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menata usaha waralaba minimarket. Kebijakan yang dilakukan yaitu dengan cara membatasi jumlah minimarket berjejaring yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga keberadaan minimarket berjejaring di Kota Yogyakarta harus mematuhi Peraturan Walikota tersebut.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 menyatakan bahwa pembatasan usaha waralaba minimarket mencakup tiga hal sebagai berikut :

- a. Mengenai jarak antara usaha waralaba minimarket dengan pasar tradisional. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa usaha waralaba minimarket berjarak paling dekat 400 meter dari pasar tradisional.
- b. Mengenai jalan-jalan yang diperbolehkan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa usaha waralaba minimarket hanya diperbolehkan di jalan-jalan yang telah ditetapkan sesuai Perwal tersebut.
- c. Mengenai jumlah atau kuota. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa jumlah usaha waralaba minimarket di setiap kecamatan dibatasi yaitu 52 gerai minimarket.

Tujuan pembatasan usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah.
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoly dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, kecil dan Menengah.
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang-perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- e. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

3. Arah Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket di Kota Yogyakarta

Hasil dari wawancara dengan Dinas Perizinan pada Bidang Regulasi dan Pengembangan, bahwa untuk kuota usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi yaitu 52 gerai minimarket, maka Dinas Perizinan tidak akan memproses lagi jika ada yang mengajukan izin pendirian usaha waralaba minimarket. Jika ada

minimarket berjejaring yang didirikan sebelum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010, maka usaha tersebut tetap dapat beroperasi, tetapi hanya diberi kesempatan untuk satu kali masa perpanjangan izin gangguan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b. Setelah izin usaha habis maka Pemerintah Kota tidak memberikan lagi perpanjangan izin, dan mereka harus berhenti beroperasi atau pindah lokasi. Tetapi jika usaha waralaba minimarket tersebut tetap beroperasi maka yang akan menindaklanjuti adalah Dinas Ketertiban.

Tindakan yang dilakukan terhadap waralaba minimarket yang terbukti melakukan pelanggaran karena tidak memiliki izin, maka pemilik minimarket akan langsung diundang ke Dinas Ketertiban kemudian dilakukan penyidikan. Setelah itu diajukan ke pengadilan. Setelah putusan pengadilan menyatakan bersalah maka sanksi bagi pemilik minimarket pada umumnya berupa sanksi denda. Kemudian Dinas Ketertiban memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat peringatan atau segera mengurus izin gangguan (HO) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 kali, tetapi karena sudah ada kebijakan pembatasan usaha waralaba minimarket Pemerintah Kota harus konsisten dengan tidak mengeluarkan izin, jika setelah SP-3 tidak ada reaksi atau tindakan dari pemilik minimarket tersebut untuk menutup sendiri usahanya sampai batas terakhir waktu yang diberikan

maka akan dilakukan penutupan paksa oleh Dinas Ketertiban.

Apabila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan dari Disperindagkoptan. Pembinaan tentang usaha yang belum memiliki izin maka akan dilakukan pembinaan untuk mengurus izin. Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Disperindagkoptan mengirimkan surat laporan ke Dinas Perizinan tentang usaha yang belum memiliki izin, kemudian koordinasi dengan Dinas Ketertiban untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat meskipun sudah ada kebijakan mengenai pembatasan usaha waralaba minimarket yaitu Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, namun sepertinya kekuatan hukumnya masih kurang kuat. Sehingga perlu dibuat pengaturan melalui regulasi tingkat daerah yang disusun oleh dinas terkait yaitu peraturan daerah mengenai penataan usaha waralaba minimarket agar pelanggaran bisa diminimalisir.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, bahwa menurut penulis pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut

belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih ada saja usaha waralaba minimarket yang melanggar Peraturan Walikota, walaupun mayoritas sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Pelanggaran yang dilakukan setelah Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai izin pendirian usaha waralaba minimarket. Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan minimarket yang berdiri sebelum Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai jarak dan ruas jalan yang tidak di berpolehkan, tetapi usaha tersebut masih diberi kesempatan satu kali masa perpanjangan.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta juga tidak mengatur mengenai sanksi terhadap para pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah melanggar Peraturan Walikota tersebut, sehingga tidak ada penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar.

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan perlindungan dan upaya-upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional karena hal tersebut sangat penting agar dalam perkembangannya pasar tradisional tidak tersingkir karena keberadaan toko modern, sehingga diharapkan ritel tradisional dan ritel modern dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan. Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya pengawasan terhadap toko modern melalui pengkajian ulang izin operasional usaha tiap tahun. Memperketat persyaratan pendirian toko modern, meningkatkan sanksi dan hukum yang tegas bagi toko modern ilegal. Harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan, supaya setelah Peraturan

Walikota dibuat tidak kalah pentingnya juga dengan adanya penegakan hukum secara tegas. Menurut penulis Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta yang saat ini berlaku perlu direvisi kembali. Perwal harus diperketat, sehingga tidak memungkinkan lagi terjadi kecurangan pengelolaan waralaba minimarket dengan cara dialihkan kepemilikannya perorangan, namun sebenarnya tetap waralaba.

Daftar Pustaka

Buku-Buku :

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Waralaba*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bob Foster, 2008, *Manajemen Ritel*, Alfabeta, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan Widjaja, 2001, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harsono, 2006, *Bisnis Pengantar*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1985, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, PT.Alumni, Bandung

Sonny Sumarsono, 2009, *Manajemen Bisnis Waralaba*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

D.C.Horax, 2013, *Kajian Sosiologi Hukum Keberadaan Waralaba Minimarket Di Kota Makasar*, Skripsi Universitas Hasanudin Makasar

Dianovi Putri Mandasari, 2013, *Pengaturan Tentang Posisi Dominan Minimarket Dengan Sistem Franchise dan Dampaknya Terhadap Toko-Toko Tradisional*, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perdagangan dan Toko Modern

Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta

Website Internet :

<http://bagushardono.blogspot.co.id/2013/03/tentang-penulisan.html?m=1>

<http://edisicetak.joglosemar.co/berita/melanggar-izin-dua-minimarket-dicabut-65328.html>

<https://id..wikipedia.org/wiki/Waralaba>

<http://jogja.antaranews.com/m/berita/333808/yogyakarta-menerbitkan-tiga-surat-peringatan-minimarket-waralaba>

<http://jogja.tribunnews.com./2013/11/20/pemkot-yogya-kaji-kembali-ijin-52-minimarket-berjejaring>

<http://prastna.wordpress.com/tag/jenis-wawancara/>

Tesis :